



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021-3500334, Faksimili 021-3864607

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912 - 19

www.kemendesa.go.id

06 OCT 2021

1601 BJKD

45951
114

08 OCT 2021

Nomor : B-2016/KP.13.01/IX/2021

27 September 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : 2 (dua) Berkas

Hal : Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Tahun 2021

Kabid Mutaz
TL

**Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama
LPNK;
2. Sekretaris Daerah Provinsi di Indonesia.
di tempat**

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2021, akan diselenggarakan Seleksi Terbuka yang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana pengumuman terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan bantuan Saudara/i untuk kiranya dapat menginformasikan pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud, kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Saudara/i. Informasi lengkap tentang ketentuan, persyaratan, dan tahapan Seleksi Terbuka dapat dilihat di <https://www.kemendesa.go.id>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Panitia Seleksi,


Taufik Madjid
Taufik Madjid, S.Sos., M.Si.
NIP. 19710701 199903 1 013

Tembusan:

1. Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

Lampiran : Daftar Kementerian/ Lembaga Negara
Nomor : B-2016/KP.13.01/IX/2021
Tanggal : 27 September 2021

A. Sekretariat Lembaga Negara

1. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung;
5. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
7. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah.

B. Sekretariat Kementerian dan Setingkat Kementerian

1. Sekretariat Kabinet;
2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
6. Kementerian Sekretariat Negara;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Agama;
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Kementerian Keuangan;
13. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
14. Kementerian Kesehatan;
15. Kementerian Sosial;
16. Kementerian Ketenagakerjaan;
17. Kementerian Perindustrian;
18. Kementerian Perdagangan;
19. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
20. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. Kementerian Perhubungan;
22. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
23. Kementerian Pertanian;
24. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
25. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
28. Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
31. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

C. Sekretariat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

1. Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Badan Intelijen Negara;
3. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
4. Badan Kepegawaian Negara;
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Badan Informasi Geospasial;
8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Badan Narkotika Nasional;
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
13. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
15. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
16. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
17. Badan Pusat Statistik;
18. Badan SAR Nasional;
19. Badan Standardisasi Nasional;
20. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
21. Badan Siber dan Sandi Negara;
22. Lembaga Administrasi Negara;
23. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
24. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Lembaga Ketahanan Nasional;
26. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
27. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

D. Sekretariat Daerah Provinsi

1. Sekretariat Daerah Provinsi Aceh;
2. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
6. Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
7. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
8. Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
9. Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
10. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
12. Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
13. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
14. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
18. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
19. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
20. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
21. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
22. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

24. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
25. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
27. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
29. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
30. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
31. Sekretariat Daerah Provinsi Maluku;
32. Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
33. Sekretariat Daerah Provinsi Papua;
34. Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.

Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Panitia Seleksi,



Taufik Madjid, S.Sos., M.Si.
NIP. 19710701 199903 1 013